



Judul : Anggaran pendidikan belum tepat sasaran
Tanggal : Sabtu, 09 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Banyak Dibelokkan Anggaran Pendidikan Belum Tepat Sasaran

KETUA Fraksi Partai Golkar di MPR Melchias Markus Mekeng mengkritik penggunaan anggaran pendidikan nasional yang dinilai masih jauh dari kata tepat sasaran. Padahal, alokasi anggaran pendidikan telah mencapai Rp 724 triliun atau 20 persen dari total APBN 2025, sesuai amanat konstitusi.

"Anggaran pendidikan sebesar Rp 724 triliun tidak sepenuhnya digunakan untuk menunjang kualitas pendidikan. Banyak yang melenceng dari tujuan," kata Mekeng dalam sarasehan nasional bertema "Merumuskan Kembali Anggaran Pendidikan Guna Mewujudkan Amanat Konstitusi Menuju Indonesia Emas 2045" di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Ia menyoroti alokasi anggaran yang timpang. Dari total Rp 724 triliun, hanya Rp 91,4 triliun digunakan untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang menysasar 64 juta siswa. Sebaliknya, Rp 104,5 triliun dialokasikan untuk sekolah kedinasan yang hanya menampung sekitar 13 ribu siswa.

"Adilkah itu? Padahal menurut PP No. 18 Tahun 2022, anggaran kedinasan tidak termasuk dalam anggaran pendidikan," tegas Mekeng. Ia mendesak Menteri Keuangan agar anggaran sekolah kedinasan dialokasikan dari sumber pendapatan lain, bukan dari porsi pendidikan.

Lebih lanjut, Mekeng merinci anggaran Pendidikan tersebar di Kemendikdasmen: Rp 33,5

triliun, Kemendiksisaintek: Rp 57,7 triliun, PIP, riset, infrastruktur, dll: Rp 101,5 triliun. Sisanya, sekitar Rp 300 triliun, justru digunakan untuk transfer daerah seperti DAU dan DAK yang tidak spesifik untuk pendidikan.

"Jadi ke mana uang itu semua? Kita hanya bermimpi soal Indonesia Emas 2045 kalau begini terus," kritik legislator asal NTT tersebut.

Mekeng juga mengungkapkan bahwa banyak Pemda tidak mengalokasikan dana pendidikan secara memadai dalam APBD-nya. Padahal, kondisi pendidikan di Indonesia menurutnya terus menurun, meski anggaran konstitusional 20 persen sudah berjalan.

Sementara, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menegaskan, tantangan terbesar bukan pada jumlah anggaran, melainkan pada efektivitas dan kualitas penggunaannya. "Masalah utama ada pada penyerapan anggaran yang tidak optimal, terutama di tingkat sekolah dan daerah," ujarnya.

Ia meminta pemerintah pusat dan daerah serius memperbaiki distribusi dan efisiensi belanja pendidikan agar manfaatnya merata hingga pelosok tanah air.

Menanggapi kritik tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa anggaran pendidikan 2025 sebesar Rp 724,3 triliun sudah dialokasikan sesuai amanat konstitusi. Alokasi ini mencakup berbagai aspek ekosistem pendidikan nasional. ■ TIF